

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA  
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Masalah Aset Ganjal WTP  
Entitas / Cakupan : Kota Bandung  
Sumber / Hal : Galamedia/Hal.2  
Edisi : Senin, 9 April 2018

# Masalah Aset Ganjal WTP

## ■ Optimalkan Data, Pemkot Kerjasama dengan BPKP

### WASTUKANCANA, (GM).-

Permasalahan aset menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, mengingat belum sepenuhnya aset tersebut tertata dengan baik. Masalah ini juga yang mengganjal Kota Bandung gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kepemimpinan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Siena Halim mengatakan, pihaknya tengah memproses penyelesaian masalah aset. Ia menyebut, tahun 2017

ada Rp 11 triliun nilai aset yang dokumennya belum lengkap.

Dari jumlah tersebut, tinggal Rp 2,7 triliun yang harus segera dituntaskan. "Tahun lalu itu sekitar Rp 8 triliun aset yang diterima BPK. Kami memang kesulitan untuk menemukan data, khususnya data-data lama sebelum tahun 2005," ujarnya di Plaza Kota Bandung, Jln. Wastukencana, Minggu (8/4).

Ia melanjutkan, setiap sektor memiliki karakteristik dokumen masing-masing seperti sektor piutang pajak yang memerlukan keakuratan data terkait pelimpahan piutang.

"Untuk mengetahui pihak mana saja yang punya piutang pajak, nilainya berapa, apakah wajib pajaknya mengakui, dan sebagainya itu 'kan butuh proses," katanya.

Kendati demikian, Pemkot Bandung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk lebih mengoptimalkan proses pendataan aset.

"Karena ini merupakan harapan kita bersama sehingga perlu kolaborasi dengan semua pihak agar cita-cita ini bisa terwujud," ucapnya.

**Tidak mudah**

Sekretaris BPKA Kota Ban-

dung, Budhi Rukmana menambahkan bahwa penertiban aset memang tidak mudah dilakukan, namun harus diupayakan. Menurutnya, titik berat berada pada proses administrasi.

Budhi menyebut, ada beberapa sektor yang disoroti BPK yaitu piutang pajak, aset, utang jangka pendek, dan persediaan. Beberapa sektor tersebut, imbuhnya, sudah masuk ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"LKPD sudah diserahkan pada 29 Maret 2018. Setelah itu, awal bulan ini BPK mulai mengaudit untuk LKPD 2017," katanya.

Ia membenarkan bahwa pem-

benahan aset memang menjadi fokus perhatian, sebab target ini sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 2018.

"Persoalan aset tidak mudah, tetapi tetap bisa dikerjakan. Kita target tahun ini menjadi WTP," ucapnya.

Tahun 2017, Wali Kota Bandung nonaktif, Ridwan Kamil mengaku butuh banyak waktu untuk menuntaskan masalah aset. Bahkan, ia menjanjikan masalah tersebut dapat rampung di akhir 2017. Namun, hingga kini masalah aset masih belum bisa diselesaikan dengan baik. **(wina)\*\***